

BAB III

PARIS AGREEMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP SWEDIA

Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (legally binding and applicable to all) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (common but differentiated responsibilities and respective capabilities), dan memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang. Di samping itu, Persetujuan Paris mengamanatkan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.

Paris Agreement merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C. Selain itu, Paris Agreement bertujuan juga untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Pemerintah Swedia telah meratifikasi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa

mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat.

1. Manfaat Paris Agreement

Dengan mengesahkan Paris Agreement, Swedia akan mendapatkan manfaat antara lain:

- a. Peningkatan perlindungan wilayah Swedia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- b. Peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Swedia.
- c. Menjadi Para Pihak yang dapat berperan serta (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan terkait Paris Agreement, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Paris Agreement.
- d. Memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi (UNFCCC, 2015).

2. Materi Pokok Paris Agreement

Paris Agreement memuat materi pokok substansi sebagai berikut:

- a. Tujuan Paris Agreement adalah untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5°C.
- b. Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan Kontribusi yang ditetapkan

Secara Nasional (Nationally Determined Contributions). Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut.

- c. Komitmen para pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi.
- d. Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil.
- e. Pengembangan kerja sama sukarela antarnegara dalam rangka penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan nonpasar
- f. Penetapan tujuan global adaptasi untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim sebagai pengakuan bahwa adaptasi merupakan tantangan global yang membutuhkan dukungan dan kerja sama internasional khususnya bagi negara berkembang.
- g. Pengakuan pentingnya meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan (loss and damage) akibat dampak buruk perubahan iklim.
- h. Kewajiban negara maju menyediakan sumber pendanaan untuk membantu para pihak negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Selain itu, pihak lain dapat pula memberikan dukungan secara sukarela.

- i. Peningkatan aksi kerja sama seluruh negara dalam hal pengembangan dan alih teknologi.
- j. Perlunya kerja sama semua pihak untuk memperkuat kapasitas negara berkembang dalam implementasi Paris Agreement dan kewajiban negara maju untuk memperkuat dukungan bagi peningkatan kapasitas di negara berkembang.
- k. Kerja sama semua pihak dalam upaya penguatan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, dan akses publik terhadap informasi mengenai perubahan iklim.
- l. Pembentukan dan pelaksanaan kerangka kerja transparansi dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan efektivitas implementasi, meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara berkembang. Kerangka ini merupakan pengembangan dari yang sudah ada di bawah Konvensi.
- m. Pelaksanaan secara berkala inventarisasi dari implementasi Persetujuan Paris untuk menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan Paris Agreement (global stocktake dimulai tahun 2023 dan selanjutnya dilakukan setiap lima tahun).
- n. Pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dan mendorong kepatuhan terhadap Paris Agreement.
- o. Persetujuan Paris berlaku pada hari ke-30 setelah 55 negara yang mencerminkan paling sedikit 55 persen emisi global telah menyimpulkan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi kepada lembaga penyimpanan (depositary).
- p. Tidak ada persyaratan yang dapat dibuat terhadap Persetujuan Paris (UNFCCC, 2015).

Adapun Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional sebagai pernyataan komitmen implementasi Persetujuan Paris. Dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement, kontribusi nasional terhadap upaya global yang dituangkan dalam kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional, semua pihak Negara melaksanakan dan mengomunikasikan upaya ambisiusnya dan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu, yang terkait dengan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (mitigasi), adaptasi, dan dukungan pendanaan, teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang oleh negara maju (UNFCC, 2015).

Mitigasi Uni Eropa yang didalamnya termasuk Swedia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan Paris Agreement, Mitigasi Swedia kiranya perlu ditetapkan secara berkala. Pada periode pertama, target Mitigasi Uni Eropa adalah mengurangi emisi sebesar 40 persen, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian. Komitmen Mitigasi Swedia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya (UNFCC, 2015).

3. Pengaruh Paris Agreement terhadap Swedia

Pada bulan Juni 2017, Riksdag memutuskan untuk mengajukan kerangka kerja kebijakan iklim Bersama dengan undang-undang iklim Swedia. Kerangka tersebut adalah respon Swedia terhadap Paris Agreement. Swedia akan memiliki 0 persen emisi di atmosfer pada tahun 2045 (Government Offices of Sweden, 2017).

Kerangka ini berisi sasaran iklim yang baru dan ambisius, undang-undang iklim dan rencana untuk dewan kebijakan iklim. Kerangka ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kebijakan iklim. Kerangka ini juga akan memberikan perusahaan dan masyarakat untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dalam jangka panjang. Untuk pertama kalinya, Swedia juga akan memiliki tindakan di mana setiap pemerintah memiliki kewajiban untuk mengejar kebijakan iklim berdasarkan sasaran iklim yang diadopsi oleh Riksdag. Setiap bagian dari pemerintah harus memberikan laporan yang jelas tentang cara kerja sasaran tersebut. dan dewan kebijakan iklim independen akan meninjau seberapa baik sasaran iklim tersebut terpenuhi dalam setiap kebijakan. Reformasi adalah komponen kunci dari upaya Swedia untuk mematuhi Paris Agreement.

Mulai 1 Januari 2018, undang-undang iklim menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan iklim pemerintah harus berdasarkan sasaran iklim.
- b. Pemerintah harus menyiapkan laporan iklim dalam *bill* setiap tahun.
- c. Setiap 4 tahun, pemerintah harus menyusun rencana aksi kebijakan iklim dan menggambarkan bagaimana tujuan iklim tersebut tercapai.
- d. Sasaran kebijakan iklim dan sasaran kebijakan anggaran harus bekerja Bersama dalam mewujudkan reformasi ini

Seiring berjalannya waktu Swedia kembali menambahkan sasaran iklim yang baru dalam reformasi ini, sasaran iklim yang baru sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2045, Swedia akan memiliki nol emisi gas rumah kaca ke atmosfer dan setelah itu harus mencapai emisi negatif. Emisi negatif berarti bahwa Swedia secara keseluruhan membantu negara lain mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer melalui proyek-proyek iklim yang dikejar oleh Swedia di luar negeri. Namun, emisi dari kegiatan di Swedia harus setidaknya 85 persen lebih rendah daripada tahun 1990. Berdasarkan perkiraan populasi saat ini untuk Swedia, emisi akan kurang dari satu ton per orang pada tahun 2045.
- b. Pada tahun 2030, emisi dari transportasi domestik (tidak termasuk penerbangan domestik), akan berkurang setidaknya 70 persen dibandingkan dengan tahun 2010 (Alasan penerbangan domestik tidak termasuk dalam sasaran karena penerbangan domestik termasuk dalam ETS) .
- c. Pada tahun 2030, emisi di Swedia di sektor-sektor yang akan dicakup oleh *EU Effort Sharing Regulation* UE (Emisi berasal dari transportasi, permesinan, industri kecil dan pembangkit energi, perumahan dan pertanian. Emisi ini tidak termasuk dalam ETS, yang mencakup sebagian besar emisi dari output pemanas industri, listrik dan distrik, serta penerbangan yang berangkat dari dan tiba di Area Ekonomi Eropa atau EEA) dan setidaknya 63 persen lebih rendah daripada tahun 1990.

- d. Pada tahun 2040, emisi di Swedia di sektor-sektor yang akan dicakup oleh *EU Effort Sharing Regulation* harus setidaknya 75 persen lebih rendah daripada tahun 1990 (Government Offices of Sweden, 2017).

Sasaran-sasaran ini mencerminkan kepemimpinan iklim internasional yang hebat di Swedia, dan menunjukkan bahwa Swedia berjanji untuk mencapai pengurangan emisi yang jauh melebihi pengurangan emisi yang dipersyaratkan kepada Swedia di bawah *EU Effort Sharing Regulation* yang akan datang (Government Offices of Sweden, 2017).

Adapun tujuan nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2045, juga akan mungkin bias terapai pada tahun 2030 dan 2040 melalui langkah-langkah tambahan, seperti peningkatan penyerapan karbon dioksida oleh hutan atau investasi dalam berbagai proyek iklim di luar negeri. Pada tahun 2030 emisi dari kegiatan di Swedia harus setidaknya 55 persen lebih rendah daripada pada tahun 1990, dan pada tahun 2040, paling sedikit 73 persen lebih rendah daripada tahun 1990 (Government Offices of Sweden, 2017).

Pilar ketiga dari kerangka kerja ini adalah dewan kebijakan iklim. Dewan kebijakan iklim bertugas untuk mendukung Pemerintah dengan memberikan penilaian independen tentang bagaimana kebijakan keseluruhan yang disajikan oleh Pemerintah apakah sesuai dengan sasaran iklim. Dewan akan mengevaluasi apakah arah berbagai bidang dari kebijakan akan meningkatkan atau mengurangi kemungkinan pencapaian sasaran iklim atau tidak (Government Offices of Sweden, 2017).